

BAB II

DINAMIKA KEANGGOTAAN INGGRIS DALAM UNI EROPA

Referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 merupakan sebuah efek bola salju dari dinamika hubungan sejak berpuluh tahun lalu sebelum organisasi Uni Eropa tersebut berdiri. Tidak hanya itu, intrik politik domestik dan persepsi negatif yang mengakar dalam masyarakat Inggris juga merupakan dua faktor yang mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.

A. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa

“There is a remedy which ... would in a few years make all Europe ... free and ... happy. It is to re-create the European family, or as much of it as we can, and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of United States of Europe.” – Winston Churchill, Zurich 1946 (Mr Winston Churchill speaking in Zurich)

Perang Dunia II yang berlangsung selama enam tahun (1939-1945) merupakan periode berdarah bagi negara-negara di kawasan Eropa. Perang ini tidak hanya berdampak pada hancurnya infrastruktur, perekonomian, dan jatuhnya jutaan korban jiwa, namun lebih dari itu terdapat trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat Eropa secara keseluruhan. Berangkat dari fakta tersebut, para pemimpin negara di Eropa berusaha untuk membangun negara mereka kembali.

Pada sebuah pertemuan yang dihelat di Universitas Zurich pada tahun 1946, Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, merupakan salah satu pihak yang mendukung adanya gagasan integrasi Uni Eropa yang ia sebut *sebagai United States of Europe*. Pada saat itu, ia menyatakan bahwa Inggris bersama-sama dengan

seluruh negara persemakmurannya akan tetap terpisah dengan *United States of Europe*. Inggris, Amerika Serikat, dan mungkin USSR akan menjadi ‘teman dan sponsor utama dari Eropa yang baru’ (Bache & George, 2006). Hal pertama yang akan menjadi fokus utama dalam skema ini adalah pembentukan persekutuan antara Perancis dan Jerman sebagai sebuah batu pijakan dari terbentuknya Dewan Uni Eropa. Dalam pidato yang dibawakan oleh Churchill di universitas tersebut semakin jelas terlihat bahwa Inggris tidak ingin menjadi bagian dari organisasi supranasional tersebut. Menolak untuk berpartisipasi, Inggris memilih jalannya dengan hanya melakukan *close association* dengan komunitas Uni Eropa (Edler B, 1959).

Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman memaparkan sebuah skema kerjasama terkait dengan integrasi industri batu bara dan baja yang dikenal dengan *Schuman Plan* dan mengundang negara-negara Eropa lainnya untuk ikut berpartisipasi. Adanya penyatuan industri batu bata dan baja ini merupakan sebuah solusi untuk mencegah konflik utama antara Perancis dan Jerman yang berpotensi memunculkan perang. Singkatnya, penyatuan industri ini merupakan sebuah cara agar tidak ada satu negara pun yang memiliki kekuasaan lebih terhadap industri batu bara dan baja yang pada masa itu merupakan sumber industri alat-alat perang. Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk menjamin pasokan batu bara bagi industri baja Perancis hingga daerah Ruhr berada di bawah kekuasaan Jerman.

Skema ini diterima oleh Kanselir Jerman pada masa itu, Konrad Adeneur, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Kerangka kerjasama ini kemudian dimanifestasikan menjadi sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya

Uni Eropa pada saat ini, yakni *The European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1952 dengan *The Treaty of Paris* sebagai perjanjian yang menjadi basis kerjasama tersebut. Inggris, di sisi lain, menolak untuk bergabung dalam skema ECSC meskipun telah diundang. Pada tahun-tahun selanjutnya, Inggris hanya mengirim perwakilan untuk mengamati perkembangan ECSC tersebut.

Menurut hemat Schuman, ECSC ini merupakan sebuah batu pijakan pertama yang digunakan menuju kerjasama yang lebih komprehensif dengan negara-negara Eropa di masa yang akan datang. Hal ini terbukti dengan adanya harapan akan kerjasama yang lebih kompleks. ECSC yang merupakan komunitas yang secara definisi bekerja dibawah sektor yang sangat spesifik menyebabkan adanya keinginan untuk membuka saluran kerjasama di bidang lainnya. Terbukti pada tahun 1957, Belgia, Belanda, Italia, Luxemburg, dan Jerman Barat menandatangani *Treaty of Rome* yang menjadi basis pembentukan *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (EURATOM). Kedua komunitas yang bertujuan untuk memperluas integrasi negara-negara anggota ke semua aspek perekonomian dan melakukan penggabungan industri energi nuklir. Negara-negara anggota kemudian memutuskan bahwa ECSC, EEC, dan EURATOM akan diorganisasikan dalam sebuah majelis umum dan badan peradilan yang sama.

Pada tahun 1968, untuk pertama kalinya *custom union* diperkenalkan dalam skema kerjasama EEC. *Custom Union* adalah sebuah mekanisme yang mengizinkan adanya pembebasan hambatan perdagangan berupa bea masuk dan kuota di antara negara-negara anggota serta adanya penyamaan tarif terhadap barang-barang dari

luar Eropa. *Custom Union* ini merupakan langkah pertama menuju pasar tunggal seperti yang ada seperti sekarang ini.

Perkembangan EEC yang kian masif menarik banyak negara untuk masuk dalam organisasi supranasional ini. Pada tahun 1973, Inggris, Denmark, dan Irlandia secara resmi masuk sebagai anggota baru yang menandai perluasan pertama organisasi ini. Di sisi lain, EEC sebagai sebuah organisasi supranasional juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di luar organisasi untuk bisa menjalin kerjasama di masa yang akan datang. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengakui keberadaan EEC. Pada tahun 1972, didirikanlah *European Commission* di Washington DC yang menjadi sebuah kantor perwakilan pertama yang memiliki status hukum dan diakui oleh Kongres dan Presiden Nixon pada masa itu.

Guna melakukan integrasi perekonomian yang lebih holistik, diluncurkanlah *European Monetary System* (EMS) pada tahun 1979. EMS merupakan cikal bakal dari persatuan ekonomi dan moneter di antara negara-negara anggota. Sistem ini berusaha menstabilkan kurs mata uang di antara negara-negara Eropa dan menekan inflasi dan merupakan cikal bakal dari mata uang tunggal euro. Pada tahun 1985, lima negara yakni Belanda, Belgia, Jerman, Luxemburg, dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*. Dalam perjanjian ini, lima negara tersebut sepakat untuk menghapuskan regulasi yang menghambat arus mobilisasi manusia baik di negara mereka maupun dari negara lain.

The Single European Act (SEA) ditandatangani pada tahun 1986 dan mulai dioperasikan pada tahun 1987. SEA ini merupakan hasil penyempurnaan dari *EEC Treaty* sekaligus menyempurnakan rancangan pasar tunggal. *Maastricht Treaty* kemudian ditandatangani pada tahun 1992 dan merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dari skema organisasi supranasional ini dimana EEC secara resmi berubah menjadi Uni Eropa seperti yang dikenal seperti sekarang ini. Hasil utama traktat ini adalah dikukuhkannya tiga pilar Uni Eropa yakni: *European Communities*, *Common Foreign and Security Policy*, dan *Justice and Home Affairs*. Parlemen Uni Eropa diberikan kuasa lebih dalam proses pengambilan keputusan serta adanya penambahan regulasi baru terkait beberapa area kerjasama.

Pada tahun 1997, Dewan Uni Eropa melakukan revisi terhadap *Maastricht Treaty* dan menghasilkan perjanjian baru yang disebut sebagai *The Treaty of Amsterdam*. Hasil utama yang didapat dalam perjanjian di Amsterdam ini adalah adanya pemberlakuan sanksi yang akan diberikan pada negara anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyediakan kerangka kerja sub unit yang dapat disahkan dengan minimal 8 negara, memberikan opsi *opt-out* bagi negara Inggris dan Irlandia dalam skema *Schengen Agreement*, serta menjadikan isu asylum, visa, dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali Inggris dan Irlandia).

Treaty of Nice kemudian ditandatangani pada tahun 2000 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2003. Traktat ini membahas mengenai empat masalah institusional dalam Uni Eropa. Hasil yang didapat dalam traktat ini adalah diberlakukannya sistem *qualified majority voting* dalam pengambilan keputusan,

membatasi jumlah anggota parlemen menjadi 732 orang, mengubah bobot suara negara-negara anggota pada tahun 2005, membatasi jumlah komisioner menjadi 1 orang untuk 1 negara, serta memberikan dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa.

Sementara itu, selain adanya penyempurnaan di dalam tubuh institusi dan disepakatinya berbagai skema kerjasama, Uni Eropa juga mengalami penambahan anggota pada tahun 2004 ketika negara-negara Eropa Timur yang disebut sebagai negara A8 (*accession 8*) bergabung dengan organisasi tersebut. Negara-negara tersebut terdiri atas: Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Ceko, Slovakia dan Slovenia. Dua negara lain seperti Siprus dan Malta juga ikut bergabung.

Pada tahun 2007, Uni Eropa kembali melakukan penyempurnaan dengan menandatangani *The Treaty of Lisbon* yang merupakan hasil amandemen dari *Treaty of The European Union* (sebelumnya dikenal sebagai *Maastricht Treaty*) dan *Treaty on the Functioning of the European Union* (sebelumnya dikenal sebagai *The Treaty of Rome*). *The Treaty of Lisbon* ini berisi tentang basis konstitusional organisasi Uni Eropa dan dilengkapi dengan pembentukan mekanisme kerja yang lebih efisien. Selain itu, traktat ini memberikan kekuasaan lebih kepada Brussel seperti diperpanjangnya masa jabatan Dewan Uni Eropa dan adanya mekanisme pemungutan suara untuk memutuskan tindakan terkait semua kebijakan. Pada tahun yang sama pula negara Bulgaria dan Rumania ikut bergabung di Uni Eropa. Enam tahun kemudian, negara Kroasia ikut bergabung.

Uni Eropa hari ini merupakan sebuah organisasi yang sangat kompleks dan tercatat paling terorganisir dibandingkan dengan organisasi regional lainnya. Pada saat itu, Uni Eropa memiliki 28 negara anggota dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 500 milyar. Harga mahal yang harus dibayar oleh Uni Eropa dengan kompleksitas organisasi dan jumlah anggota yang kian bertambah adalah akumulasi jumlah permasalahan dan krisis yang harus diatasi. Sebagai contoh, krisis di zona euro yang berawal dari Yunani pada tahun 2007 hingga sekarang belum sepenuhnya pulih. Selain itu isu imigran, krisis Ukraina, terorisme, hingga pengungsi dari Timur Tengah juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Uni Eropa. Organisasi tersebut pada saat ini dipaksa untuk bekerja keras untuk mempertahankan statusnya sebagai organisasi supranasional percontohan yang paling sukses meskipun ancaman terhadap ide integrasi semakin dipertanyakan akibat berbagai krisis tersebut.

B. Dinamika Keanggotaan Inggris Dalam Uni Eropa

Sejak awal keanggotannya di Uni Eropa, Inggris dikenal sebagai negara yang kontroversial dan cenderung kritis. Inggris tercatat sebagai negara yang berulang kali mengajukan keberatan terhadap berbagai kebijakan Uni Eropa dan berusaha memodifikasi ataupun melakukan kompromi terhadap beberapa area kerjasama. Inggris juga merupakan negara yang mengadvokasi sistem pasar tunggal dan mereformasi kebijakan *Common Agricultural Policy (CAP)*. Selain itu, arah kebijakan pertahanan dan luar negeri Uni Eropa sedikit banyak memakai sistem yang sesuai dengan Inggris (Gowland, Turner, & Wright, 2009).

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Inggris melalui Winston Churchill menolak berpartisipasi dalam ECSC. Para pelopor ECSC seperti Schuman dan Monnet mendukung Inggris untuk masuk dalam skema kerjasama, namun mereka tidak ingin mengutamakan masuknya Inggrisnya dengan mengorbankan ataupun melakukan kompromi terhadap gagasan ambisius mereka tersebut sesuai dengan keinginan Inggris. Oleh karena itu, proses integrasi tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran Inggris di dalamnya. Pada periode awal organisasi, Inggris hanya menjadi pengamat dalam berbagai diskusi dan negosiasi yang ada.

Namun, Inggris tidak serta merta melonggarkan pengaruhnya di Eropa begitu saja. Inggris kemudian memelopori organisasi alternatif yakni *European Free Trade Organization (EFTA)*. Organisasi ini didirikan pada tahun 1960 dengan negara anggota yang terdiri atas Austria, Portugal, negara-negara Skandinavia, Swiss, dan Inggris. Negara-negara ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki hubungan ekonomi dan budaya yang erat, merupakan anggota pakta keamanan NATO, dan cenderung netral atau menolak ide integrasi Eropa.

Pada tahun 1961 bersama-sama dengan negara Denmark dan Irlandia, Inggris mengajukan proposal untuk masuk dalam *European Community* dibawah pemerintahan Perdana Menteri Edward Macmillan. Empat tahun setelah penandatanganan *The Treaty of Rome*, Inggris akhirnya mengakui bahwa ia telah meremehkan pentingnya bergabung dengan *European Community*. Hal itu diperlihatkan dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Inggris terkategori

lambat bila dibandingkan dengan negara-negara anggota *European Community*. Inggris pada masa itu dikenal sebagai *the sick man of Europe*.

Namun, pengajuan proposal masuknya Inggris dalam *European Community* tersebut juga melahirkan perdebatan dalam lingkup politik domestik. Pada masa itu banyak pihak yang mempertanyakan apakah Inggris ‘benar-benar’ milik Eropa. Selain itu, perdebatan yang emosional terkait dengan takdir dan masa depan Inggris di *European Community* telah hangat diperbincangkan (Novy, 2013).

Keinginan bergabungnya Inggris ini diterima oleh tangan terbuka oleh negara-negara Eropa lainnya kecuali Perancis. Pada masa itu, Perancis berada di bawah kepemimpinan presidennya yang pertama yakni Charles De Gaulle. Ia memiliki beberapa kecurigaan terhadap keinginan masuknya Inggris dalam Uni Eropa yang berpotensi mengancam proses integrasi yang selama ini telah disusun dengan sedemikian rupa. Selain itu, De Gaulle menganggap bahwa kedekatan istimewa antara Inggris dan Amerika Serikat dapat membahayakan keutuhan organisasi. Oleh karena alasan-alasan tersebut, De Gaulle melakukan veto terhadap proposal keanggotaan Inggris. Berikut ini merupakan kutipan dari pernyataan De Gaulle terkait dengan pandangannya terhadap hadirnya Inggris dalam Uni Eropa:

‘England in effect is insular, she is maritime, she is linked through her interactions, her markets and her supply lines to the most diverse and often the most distant countries; she pursues essentially industrial and commercial activities, and only slight agricultural ones. She has, in all her doings, very marked and very original habits and traditions.’ (Hannan, 2016)

Meskipun sudah di veto oleh De Gaulle, Inggris kembali mengajukan diri untuk masuk ke dalam skema Uni Eropa pada tahun 1967. Usaha keduanya ini pun kembali kandas karena lagi-lagi De Gaulle melakukan veto. Penantian Inggris untuk dapat berpartisipasi dalam skema Uni Eropa dapat terkabul setelah De Gaulle tidak lagi aktif dalam pentas politik dimana negosiasi untuk masuk kembali dibuka pada tahun 1969. Pada akhirnya, keinginan Inggris untuk masuk dalam EEC tercapai pada tahun 1973 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ted Heath yang berasal dari Partai Konservatif.

Ketika Heath lengser dari jabatannya, ia digantikan oleh Harold Wilson dari Partai Buruh yang memiliki persepsi negatif terkait dengan keikutsertaan Inggris dalam EEC. Menurut Partai Buruh, masuknya Inggris di *European Communities* pada masa pemerintahan Partai Konservatif terjadi dalam kondisi yang *unfavorable* (Gibbins, 2014). Sesuai dengan janji pemilunya, Partai Buruh Wilson menawarkan dua agenda: pertama, melakukan renegosiasi terkait dengan keanggotaan Inggris dan yang kedua akan menyerahkan keputusan pada masyarakat yakni dengan menyelenggarakan referendum. Berdasarkan hasil referendum pada tahun 1975 tersebut, masyarakat Inggris memilih untuk tetap berada dalam EEC.

Selang tiga tahun kemudian, hubungan antara Inggris dan Uni Eropa kembali bersitegang terkait dengan adanya kontroversi anggaran. Isu ini merupakan salah satu isu terbesar dalam sejarah hubungan antara Inggris dan Uni Eropa. Pada masa itu, Inggris sebagai negara yang baru masuk dalam skema Uni Eropa tercatat sebagai negara yang menyumbangkan anggaran terbesar meskipun terdata sebagai negara dengan peringkat ketujuh dalam sektor perekonomian. Hal ini terkait dengan

anggaran Uni Eropa yang 70% dialokasikan pada sektor *Common Agricultural Policy (CAP)*, sementara Inggris merupakan negara yang struktur pertaniannya berbeda dari negara-negara Uni Eropa, akibatnya, Inggris menerima alokasi dana yang sedikit dari Uni Eropa.

Margaret Thatcher selaku perdana menteri pada masa itu kemudian meminta keadilan dengan mengajukan rancangan alokasi dana yang lebih besar untuk Inggris serta pemotongan sumbangan anggaran (*rebate*) pada Uni Eropa. Ia mengatakan bahwa, "*we are not asking the Community or anyone else for money, we are simply asking to have our own money back*" (Owen, 2010). Negosiasi tersebut kemudian berhasil dan diratifikasi pada tahun 1985. Pemotongan ini berstatus permanen dan menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara yang memiliki privilese tersebut. Sebagai info, negara lain seperti Austria, Belanda, Denmark, Jerman, dan Swedia hanya diberikan pengurangan sementara terhadap kontribusi anggaran mereka di Uni Eropa.

Isu kontroversial selanjutnya terkait dengan krisis *Exchange Rate Mechanism (ERM)* yang dikenal sebagai *Black Wednesday* pada tanggal 16 September 1992. Saat itu, politik domestik negara Ratu Elizabeth tersebut memanas setelah negaranya harus keluar dari *Exchange Rate Mechanism* setelah gagal mempertahankan nilai poundsterling di atas ambang batas standar ERM. Krisis ini merupakan salah satu pemicu ketidakikutsertaan Inggris dalam zona euro beberapa tahun kemudian. Pada tahun yang sama ketika *Maastricht Treaty* disahkan, Inggris tidak serta merta melakukan ratifikasi terhadap traktat tersebut dikarenakan adanya

perdebatan sengit antara pemerintah, dan anggota parlemen yang berasal dari Partai Buruh dan Liberal Demokrat pada masa itu.

Ketika *Schengen Agreement* yang merupakan mekanisme simplifikasi mobilisasi manusia diterapkan pada tahun 1999, Inggris kembali mengajukan *opt out* dengan alasan ingin mengatur dan menjaga perbatasannya sendiri. Selain itu, Inggris juga memakai opsi *opt out* pada beberapa kriteria dalam *Charter of Fundamental Rights* dalam *The Treaty of Lisbon* yang dikhawatirkan akan mengubah hukum domestik Inggris terkait dengan regulasi buruh. Inggris sebagai negara yang paling banyak mengajukan *opt out* secara jelas memperlihatkan bahwa negara tersebut tidak memiliki komitmen secara penuh dalam menjalankan seluruh mekanisme Uni Eropa.

Pada tahun 2001, ketika Perdana Menteri Tony Blair berencana memperkenalkan euro pada publik, Inggris kembali mengambil opsi *opt-out* terkait dengan kewajiban implementasi mata uang tunggal seperti yang tercantum dalam *Maastricht Treaty* tahun 1992. Wacana pengadopsian euro ini menerima kecaman yang sangat keras dari berbagai pihak dalam ruang lingkup pemerintahan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa keputusan *opt-out* ini sangat disayangkan mengingat zona euro adalah ciri dan kebijakan paling fundamental dalam sejarah berdirinya Uni Eropa.

Sepuluh tahun kemudian, ketika seluruh negara anggota bernegosiasi menyusun perjanjian baru terkait dengan penyelamatan zona euro dari krisis, Perdana Menteri David Cameron melakukan veto secara sepihak terhadap

perjanjian tersebut. Veto ini menyebabkan negara anggota lainnya harus bekerja keras dalam mengatasi krisis tersebut. Menteri Luar Negeri William Hague mengatakan bahwa perjanjian tersebut dapat memberikan kuasa yang lebih besar lagi bagi Brusel dan akan mengancam kedaulatan negara.

Banyaknya dinamika yang terjadi antara Inggris dan Uni Eropa ditambah dengan pergolakan politik domestik di Inggris kemudian menyebabkan David Cameron memberikan tawaran referendum pada tahun 2013. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris melaksanakan referendum yang hasilnya mengakhiri hubungan selama 43 tahun dengan Uni Eropa.

C. Persepsi Masyarakat Inggris Terhadap Keanggotaan Negaranya Di Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah isu yang sesungguhnya tidak begitu familiar dalam dinamika masyarakat Inggris. Hal ini merupakan akibat dari kebijakan para politisi Inggris yang tidak melibatkan masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai diskusi yang berkaitan dengan Uni Eropa. Masyarakat Inggris selalu merasa bahwa Uni Eropa merupakan institusi yang asing karena mereka jarang sekali terlibat secara langsung dalam berbagai dinamika konstitusi ataupun tereduksi terkait dengan arah integrasi Uni Eropa (Baker, 2002).

Selain itu, kurangnya informasi terkait dengan Uni Eropa menyebabkan masyarakat menggunakan sumber informasi level rendah seperti elit politik, kelompok kepentingan, dan media untuk merefleksikan kepentingan dan prasangka

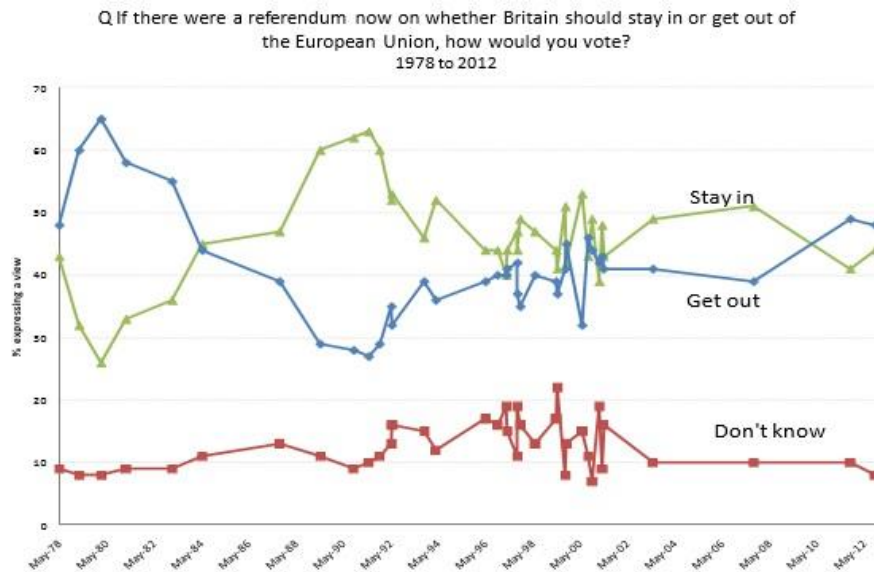
mereka (Gabel, 1998). Dalam dinamika masyarakat Inggris maupun negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, media massa berperan sangat penting dalam mengkonstruksi persepsi publik dan hal ini membangkitkan kekhawatiran tersendiri. Pada tahun 1999, 76% surat kabar di Inggris menerbitkan konten yang kontra terhadap integrasi Uni Eropa. Surat kabar Inggris seperti *The Sun*, *Mail*, *Express*, *The Daily Mail*, *The Times*, dan *The Telegraph* sering kali mengulas konten bernuansa *eurosceptic* (Anderson J. & Weymouth, 1999). Berangkat dari fakta tersebut, hampir sebagian besar masyarakat Inggris memiliki pengetahuan yang minim mengenai Uni Eropa dan kemudian berujung pada terbangunnya persepsi negatif.

Apabila dilakukan napak tilas ke belakang, opini publik Inggris terkait dengan unifikasi Uni Eropa dapat dikatakan bimbang (*undecided*) dan kurang terinformasi. Sebagai contoh, publik Inggris menentang keras pembentukan Tentara Eropa (*European Army*) pada tahun 1948. Di sisi lain, level distribusi informasi terkait dengan pembentukan dan perkembangan Uni Eropa memisahkan publik Inggris dari negara-negara anggota EEC pada masa itu. Pada tahun 1957, ketika dua per tiga masyarakat di negara-negara anggota EEC mengetahui konsep pasar tunggal, masyarakat Inggris yang mengetahui konsep tersebut terdata kurang dari 40% (Leconte, 2010).

Opini publik masyarakat Inggris yang terkait dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa masyarakat Inggris sendiri memiliki pandangan yang cukup dramatis terkait dengan status keanggotaan mereka di Uni Eropa sejak berpuluh tahun yang lalu. Dalam sejarah hubungan Inggris dan Uni Eropa, keinginan untuk

tetap dan keluar dari Uni Eropa tidak pernah memiliki margin yang lebar. Perbandingan untuk ‘tetap’ atau ‘keluar’ tersebut dapat dikategorikan tipis dan selalu berfluktuasi tergantung pada kondisi sosial politik yang terjadi di Inggris. Salah satu survei paling awal digagas oleh lembaga *Gallup* yang menemukan fakta bahwa keikutsertaan Inggris dalam skema Uni Eropa pada tahun 1973 disikapi secara dingin oleh sebagian masyarakat Inggris dimana hampir 50% masyarakat menolak keputusan tersebut (Mortimore, 2016).

Organisasi supranasional seperti Uni Eropa memiliki mekanisme tersendiri untuk mengetahui persepsi masyarakat guna mendorong munculnya opini publik. Sejak tahun 1973, *European Commission* melaksanakan survei yang disebut sebagai *Eurobarometer*. Survei ini memonitori berbagai isu terkait dengan Uni Eropa dan dilaksanakan di seluruh negara-negara anggota. Termasuk di dalamnya, *Eurobarometer* melansir hasil survei terkait dengan dukungan masyarakat terhadap keanggotaan negaranya dalam organisasi Uni Eropa. Inggris tercatat sebagai negara yang paling skeptis terhadap Uni Eropa. Sejak saat itu, persepsi masyarakat Inggris terkait Uni Eropa dapat dikategorikan selalu konsisten ke arah skeptisme hingga saat ini. Persepsi masyarakat Inggris tersebut dapat divisualisasikan dalam grafik berikut:



Gambar 1. Persepsi masyarakat Inggris terkait keanggotaan negaranya di Uni Eropa (sumber: House of Common Library, 2013)

Pada tahun 1975, pemerintah menggelar referendum terkait dengan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Referendum tersebut merupakan partisipasi masyarakat yang pertama terkait dengan keputusan keterlibatan Inggris dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Pada saat itu, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa Inggris akan tetap berada dalam skema *European Community* dengan 67% responden memilih untuk tetap (BBC, t.thn.). Sementara itu, survei yang diadakan pada tahun 1979 yakni pasca referendum tahun 1975, 60% masyarakat Inggris menyesali pilihan mereka dan hanya 32% yang memilih untuk tetap masuk dalam skema Uni Eropa. Memanasnya hubungan antara Uni Eropa dan Inggris pada masa pemerintahan Margaret Thatcher juga semakin memperdalam jurang skeptisme publik Inggris terhadap organisasi Uni Eropa meskipun juga

sempat membaik ketika status *rebate* permanen berhasil diperoleh Inggris pada tahun 1985.

Sementara itu, pada 10 tahun masa pemerintah Perdana Menteri Tony Blair, terjadi fluktuasi antara dukungan untuk ‘tetap’ menyusul dengan dukungan untuk ‘keluar’ dengan perbandingan yang sangat tipis. Dukungan terhadap pasar tunggal cukup baik—masyarakat memilih untuk ‘tetap’—meskipun terdapat penolakan keras terhadap pengadopsian euro sebagai mata uang Inggris yang sempat menyebabkan pergeseran voting sebesar 12% dalam rentang waktu tiga bulan menginginkan untuk keluar. Sementara itu, pada masa pemerintah David Cameron, dukungan terhadap keanggotaan Inggris di dalam Uni Eropa masih dikategorikan fluktuatif meskipun dukungan untuk ‘keluar’ semakin besar menjelang diadakannya referendum pada tanggal 23 Juni 2016.

Di sisi lain, masyarakat Inggris sendiri tidak begitu peduli dengan gagasan integrasi Uni Eropa yang menjadi salah satu tujuan utama organisasi tersebut. Hal ini berangkat pada kenyataan bahwa masyarakat Inggris merasa bahwa mereka berbeda dengan masyarakat dari negara-negara Eropa lainnya. Survei yang diadakan oleh BBC Mori Poll pada tahun 1995 dengan pertanyaan “Sejauh mana anda merasa sebagai orang Eropa?” memperlihatkan hasil bahwa hanya 8% responden yang merasa sebagai orang Eropa, 15% lainnya berada di tengah-tengah, dan 49% responden sama sekali tidak merasa sebagai orang Eropa (Garton A., 2001).

Sembilan tahun kemudian *British Social Attitudes* kembali menanyakan hal yang sama dan hasilnya tidak jauh berbeda: masyarakat Inggris yang mengidentifikasi diri mereka sebagai ‘orang Eropa’ (*european*) hanya sebesar 15% saja (Ormston, 2015). Hampir sebagian besar penduduk Inggris menganggap bahwa mereka adalah ‘orang Inggris’ yang merupakan bagian dari Britania Raya dan bukan ‘orang Eropa.’ Hal ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap identitas Eropa sebagai sebuah prasyarat integrasi tidak terpenuhi di Inggris. Adanya persepsi seperti ini menyebabkan minimnya dukungan dalam hubungan Inggris dengan Uni Eropa secara umum oleh masyarakat Inggris.

Adanya rasa berbeda dengan masyarakat Eropa lainnya menyebabkan terbentuknya stigma negatif terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Pada tahun 1978, hanya 43% masyarakat yang mendukung Inggris dalam pasar tunggal, 48% masyarakat menentang ide tersebut, dan 9% menyatakan tidak tahu (MORI, 1978). Hal yang sama juga dapat dilihat melalui hasil survei terkait dengan penggunaan mata uang euro pada tahun 1999. Selama periode 1999-2007, tidak pernah ada satu survei pun yang memperlihatkan data bahwa masyarakat Inggris setuju untuk mengadopsi mata uang euro (Mortimore, 2016). Sementara itu, dukungan terhadap kebijakan perluasan anggota Uni Eropa (*enlargement*) sempat menanjak namun kemudian menurun dengan signifikan, hal ini kemudian berpengaruh pada dukungan terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa.